

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH)

Eva Syahrida Siregar¹, Tetti Maisyaroh², Nur Laila³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹evasyahrida27@gmail.com, ²tettimaisyaroh@gmail.com,

³nurlaila@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan BPKH yang ditinjau berdasarkan analisis rasio keuangan dari segi rasio solvabilitas dan likuiditas. Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif komparatif, yaitu dengan meneliti laporan keuangan pertahun dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada laporan keuangan tahun 2020 dengan laporan keuangan tahun 2021 pada BPKH. Hasil penelitian mengenai tingkat likuiditas, dan solvabilitas maka dapat dilihat pengaruh terhadap laporan keuangan dan kinerja keuangan. Ditinjau dari rasio likuiditas secara keseluruhan keadaan perusahaan berada dalam keadaan yang baik. Hal ini dapat kita lihat pada rasio lancar, rasio cepat dan rasio kas bahwa pada dasarnya mengalami kenaikan. Semakin tinggi atau besarnya nilai rasio likuiditas ini menandakan bahwa keadaan perusahaan berada dalam kondisi baik atau liquid. Liquid yaitu keadaan dimana perusahaan dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik karena mampu melunasi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas wajib, kemampuan BPKH menyediakan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), seperti terlihat dalam laporan keuangan BPKH, tampak lebih dari 2X seperti yang diamanatkan UU Nomor 34 Tahun 2014 – di mana BPKH wajib menjaga 2X BPKH. Jadi, tidaklah benar, BPKH tidak likuid. Justru BPKH sangat likuid. Berdasarkan rasio solvabilitas yang diukur dengan menggunakan *debt to assets ratio* dan *debt to equity ratio*, maka dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pada BPKH sangat baik. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan BPKH atas pelunasan utang, dan seluruh kewajiban dengan menggunakan jaminan dan aset neto (harta kekayaan dalam bentuk apa pun) yang dimiliki dalam jangka panjang dan jangka pendek. Rasio solvabilitas BPKH dari tahun ke tahun terus membaik.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan, Analisis Laporan Keuangan

Abstract: The purpose of this study is to determine the financial performance of BPKH which is reviewed based on financial ratio analysis in terms of solvency and liquidity ratios. The type of research used is in the form of comparative descriptive research, namely by examining the annual financial statements by using financial ratio analysis in the 2020 financial statements with the 2021 financial statements at the BPKH. The results of research regarding the level of liquidity, and solvency, it can be seen the influence on financial statements and financial performance. Judging from the overall liquidity ratio, the company is in good condition. We can

see this in the current ratio, quick ratio and cash ratio that basically increased. The higher or greater the value of this liquidity ratio indicates that the company is in good condition or liquid. Liquid is a condition where the company is declared healthy and in good condition because it is able to pay off short-term obligations. The mandatory liquidity ratio, the ability of BPKH to provide costs for organizing the pilgrimage (BPIH), as shown in the financial statements of BPKH, appears to be more than 2X as mandated by Law Number 34 of 2014 – where BPKH is required to maintain 2X BPKH. So, it is not true, BPKH is not liquid. In fact, BPKH is very liquid. Based on the solvency ratio as measured by the debt to assets ratio and debt to equity ratio, it can be seen that the financial performance of BPKH is very good. This ratio is used to assess BPKH's ability to pay off debt and all obligations using collateral and net assets (wealth in any form) held in the long and short term. The solvency ratio of BPKH from year to year continues to improve.

Keywords: *Financial Statements, Financial Performance, Financial Statement Analysis*

PENDAHULUAN

Pentingnya persoalan pengelolaan dana haji yang besar itu maka hadir Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Berdasarkan Pasal 20, pengelolaan dana haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Yang mana BPKH memiliki tugas untuk menerima, mengembangkan, mengatur pengeluaran dan bertanggungjawab atas keuangan haji yang berhasil dihimpun oleh BPKH.¹

Menurut laporan keuangan BPKH, per Desember 2020, dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp144,91 triliun, atau meningkat 16,56% dibandingkan dengan 2019 yang tercatat Rp124,32 triliun. Nah, jika dikaitkan dengan target pada 2020, capaian target dana haji adalah 103,83%. Jika dibedah, alokasi dana haji terkonsentrasi di BPS-BPIH sebesar Rp45,33 triliun (31,3%) dan Rp99,58 triliun (68,7%). Investasi terdistribusi dalam instrumen surat berharga Syariah Rp98,47 triliun, investasi lainnya dalam negeri Rp1,03 triliun, dan investasi luar negeri Rp74 miliar. Menurut laporan keuangan, tidak terdapat investasi langsung di infrastruktur atau proyek-proyek “mangkrak”.

Alhasil, aset total meningkat 16% menjadi Rp145,77 triliun dari periode 2019 yang sebesar Rp125,26 triliun. Peningkatan aset ini dipengaruhi oleh peningkatan investasi jangka panjang. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh aturan (PP Nomor 5 Tahun 2018), selain juga kesempatan meraih imbal hasil yang lebih tinggi, maka pilihan pada investasi jangka panjang.

Dalam proses pengelolaan keuangan haji, Badan Pengelola Keuangan Haji berpegang pada prinsip tata kelola keuangan haji agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan diantaranya adalah *Transparency, Independency, Accountability, dan Responsibility*. Terciptanya program-program yang tersistematis dan diatur dengan kebijakan investasi yang dapat menghasilkan manfaat bagi jamaah dan masyarakat

¹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelola keuangan Haji. <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-34-Tahun-2014.pdf> diakses pada tanggal 2 Juni 2022.

umum tentu tidak bisa lepas dari kerja keras badan pelaksana dan dewan pengawas sebagai penggerak jalannya investasi.²

Dalam implementasinya sesuai dengan peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2018 tentang pembentukan investasi keuangan haji yang terbagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap perencanaan investasi, tahap penilaian dan persetujuan investasi, dan tahap penetapan investasi. Yang kemudian menghasilkan penetapan penempatan dan investasi dana haji dengan tetap memperhatikan prinsip syariah dalam pelaksanaan investasi

Hasil dari investasi dana haji bukan hanya didaya gunakan untuk kemaslahatan jamaah haji saja tapi juga untuk kemaslahatan umat dalam membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan BPKH yang ditinjau berdasarkan analisis rasio keuangan dari segi rasio solvabilitas dan likuiditas.

LANDASAN TEORI

LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak.³ Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁴ Kesimpulan dari kedua pengertian tentang laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang terkumpul dan disusun untuk digunakan sebagai laporan yang dapat memberi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan.

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu Analisis dan Laporan Keuangan. Untuk menjelaskan pengertian kata ini, yaitu dapat dijelaskan dari masing-masing kata. Kata analisis adalah memecahkan sesuatu atau menguraikan sesuatu untuk menjadi berbagai unit terkecil. Sedangkan laporan keuangan adalah Neraca, Laba/Rugi, dan Arus Kas (Dana).⁵

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang diharapkan benar-benar tepat pula. Kesalahan dalam memasukkan angka atau rumus akan akan berakibat pada tidak akuratnya hasil yang hendak dicapai. Kemudian, hasil perhitungan tersebut, dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diketahui posisi keuangan yang sesungguhnya. Kesemuanya ini harus dilakukan secara teliti, mendalam, dan jujur.⁶

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan

² <https://www.republika.co.id/berita/qvghw7423/akuntabilitas-pengelolaan-dana-haji-bpkh-raih-opini-wtp> diakses pada tanggal 2 Juni 2022.

³ Abdul Halim, *Auditing* (UPP STIM YKPN: Yogyakarta, 2008), h. 59

⁴ Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Bumi Aksara: Jakarta, 2012), h. 3

⁵ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 189-191

⁶ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan. Edisi 7*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008), h. 66-67

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.⁷ Penilaian Kinerja Keuangan dapat dinilai dengan perhitungan rasio keuangan. Nilai rasio keuangan tersebut yang nantinya dibandingkan dengan tolak ukur yang telah ada, membandingkan nilai rasio keuangan yang diperoleh dari tahun ke tahun merupakan langkah guna mengetahui kondisi hasil perhitungan tersebut apakah baik atau kurang baik.⁸

Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kondisi perusahaan berada dengan menggunakan perbandingan dan aturan yang berlaku.

Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan cara penting untuk menyatakan hubungan-hubungan yang bermakna diantara komponen-komponen dari laporan keuangan. Analisis rasio menggambarkan suatu hubungan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lain, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio yang akan menjelaskan atau menggambarkan kepada penganalisa baik atau buruknya keadaan posisi keuangan suatu perusahaan.

Untuk menilai kondisi keuangan perusahaan umumnya tolak ukur yang sering digunakan adalah rasio yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya. Analisis rasio keuangan yang menghubungkan unsur-unsur dari neraca dan perhitungan laba rugi satu dengan yang lainnya dapat memberikan gambaran kondisi sejarah suatu perusahaan dan kondisi bagaimana nilai posisi perusahaan pada saat ini.

Rasio analisis keuangan meliputi dua jenis perbandingan. Pertama, analisis dapat membandingkan rasio yang lalu dengan yang sekarang dan yang akan datang untuk perusahaan yang sama. Kedua, perbandingan rasio perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sejenis atau dengan industri. Pengertian analisa rasio keuangan menurut James C van Horne dalam buku Kasmir adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.

Keunggulan-keunggulan analisis rasio keuangan menurut Harahap kegunaan analisis laporan keuangan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:⁹

- 1) Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dari laporan keuangan biasa
- 2) Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (*explicit*) dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan (*implicit*)
- 3) Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan
- 4) Dapat membongkar hal-hal bersifat tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan

⁷Irham Fahmi, Analisis Kinerja Keuangan (Alfabeta: Bandung, 2012) h. 2

⁸Audri Ayuwardani Parathon, Analisis Rasio Keuangan Perbankan Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan Bank. Jurnal. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya: Malang, Jurnal Administrasi Bisnis. Vol 3, No 2 (2012)h. 3

⁹Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 195

- 5) Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi dan peningkatan.

RASIO LIKUIDITAS

Rasio Likuiditas dapat didefinisikan sebagai rasio yang menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dikenal juga sebagai rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kapabilitas perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo.¹⁰

Sejalan dengan itu Prastowo, mengatakan bahwa rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditor jangka pendek. Rasio likuiditas atau disebut juga rasio modal kerja bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.¹¹

Jenis-Jenis Rasio Likuiditas Berikut adalah jenis-jenis rasio likuiditas menurut yang lumrah dipakai dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek:¹²

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang ada. Rasio lancar menggambarkan jumlah ketersediaan aset lancar yang dimiliki dibandingkan dengan total kewajiban lancar. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio lancar:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

b. Rasio Sangat Lancar (*Quick Ratio atau Acid Test Ratio*)

Skala likuiditas perusahaan yang lebih teliti terdapat pada ratio yang disebut rasio sangat lancar, dimana persediaan dan persekot biaya dikeluarkan dari total aktiva lancar, dan hanya menyisakan aktiva lancar yang likuid saja yang kemudian dibagi dengan kewajiban lancar. Quick ratio dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Surat berharga} + \text{piutang}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

c. Rasio Kas (*Cash Rasio*)

Merupakan perbandingan dari kas yang ada diperusahaan dan di bank dengan total hutang lancar. Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan uang kas dan surat berharga yang mudah diperdagangkan, yang tersedia didalam perusahaan. Berikut adalah rumus untuk menghitung rasio kas:

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

¹⁰ Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2016), h. 149

¹¹ Dwi Prastowo Darminto, *Analisis Laporan Keuangan*, (UPP STIM YKPN: Yogyakarta, 2011), h. 83

¹² Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2016), h. 152

Kewajiban Lancar

RASIO SOLVABILITAS

Menurut Kasmir Rasio solvabilitas (*leverage ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.¹³

Pengukuran Rasio Solvabilitas

Biasanya penggunaan rasio solvabilitas atau *leverage* disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Artinya perusahaan dapat menggunakan rasio leverage secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara keseluruhan, artinya seluruh jenis rasio yang dimiliki perusahaan, sedangkan sebagian artinya perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio yang dianggap perlu untuk diketahui.

- a. *Debt to Assets Ratio (DAR)* *Debt ratio* menunjukkan seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan yang didanai oleh seluruh krediturnya. DR dapat diperoleh dengan cara :

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

Makin tinggi DAR akan menunjukkan makin berisiko perusahaan karena makin besar utang yang digunakan untuk pembelian asetnya.

- b. *Debt to Equity Ratio (DER)* *Debt to equity ratio* menunjukkan perbandingan antara utang dan ekuitas perusahaan. DER diperoleh dengan cara :

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

Makin tinggi DER maka makin berisiko perusahaan.

METODE PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif komparatif, yaitu dengan meneliti laporan keuangan pertahun dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada laporan keuangan tahun 2020 dengan laporan keuangan tahun 2021 pada BPKH.

JENIS DAN SUMBER DATA

Data adalah informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel atau populasi, jenis data dapat dibedakan menjadi dua jenis Yaitu :¹⁴

1. Data kualitatif, merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian.

¹³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan. Edisi 7*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008), h.151

¹⁴ Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Andi: Yogyakarta, 2008), h.

2. Data kuantitatif, merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka-angka), namun dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuatitatifkan agar dapat diproses.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu laporan keuangan tahun 2020 dan laporan keuangan tahun 2021 pada BPKH.

Sumber data menurut Kuncoro dibedakan menjadi dua, yaitu : ¹⁵

1. Data primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data Sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa dokumen laporan keuangan tahun 2020 dan laporan keuangan 2021 yang diperoleh dari BPKH.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM

BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji beraskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

VISI MISI

Visi BPKH

Menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat

Misi BPKH

1. Membangun kepercayaan melalui pengelolaan sistem keuangan yang transparan dan modern
2. Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas BPIH melalui kerjasama strategis
3. Melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas
4. Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan SDM yang berintegritas dan profesional
5. Memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat

Tugas BPKH

BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

Fungsi BPKH

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji

¹⁵ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Erlangga, Jakarta, 2008), h. 127

2. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji
3. Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.¹⁶

HASIL PENELITIAN

Informasi mengenai tingkat likuiditas, dan solvabilitas maka dapat dilihat pengaruh terhadap laporan keuangan dan kinerja keuangan yang telah disajikan di dalam laporan keuangan BPKH yang telah tersedia, yaitu laporan neraca, dan laporan laba rugi yang dapat menjadi tolak ukur dan dapat digunakan dalam menganalisis laporan keuangan, yaitu dengan rasio yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya. Berikut ini akan disajikan hasil analisis keuangan terhadap laporan keuangan BPKH berdasarkan informasi akun yang tersedia.

1. Rasio Likuiditas

Tabel Perbandingan Rasio Likuidits BPKH Tahun 2020 dan 2021

Keterangan	2020	2021	Hasil	Interpretasi
Rasio Lancar	6,32	6,24	Naik	Baik
Rasio Cepat	5,23	5,45	Naik	Baik
Rasio Kas	5,25	5,15	Naik	Baik

Ditinjau dari rasio likuiditas secara keseluruhan keadaan perusahaan berada dalam keadaan yang baik. Hal ini dapat kita lihat pada rasio lancar, rasio cepat dan rasio kas bahwa pada dasarnya mengalami kenaikan. Semakin tinggi atau besarnya nilai rasio likuiditas ini menandakan bahwa keadaan perusahaan berada dalam kondisi baik atau liquid. Liquid yaitu keadaan dimana perusahaan dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik karena mampu melunasi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas wajib – kemampuan BPKH menyediakan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), seperti terlihat dalam laporan keuangan BPKH, tampak lebih dari 2X seperti yang diamanatkan UU Nomor 34 Tahun 2014 – di mana BPKH wajib menjaga 2X BPIH. Jadi, tidaklah benar, BPKH tidak likuid. Justru BPKH sangat likuid.

2. Rasio Solvabilitas

Tabel Perbandingan Rasio Likuidits BPKH Tahun 2020 dan 2021

Keterangan	2020	2021	Hasil	Interpretasi
DAR	92,5	88,9	Turun	Baik
DER	12,4	8,03	Turun	Baik

Berdasarkan tabel perbandingan rasio solvabilitas yang diukur dengan menggunakan *debt to assets ratio* dan *debt to equity ratio*, maka dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pada BPKH sangat baik. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan BPKH atas pelunasan utang, dan seluruh kewajiban dengan menggunakan jaminan dan aset neto (harta kekayaan dalam bentuk apa pun) yang

¹⁶ www.bpkh.go.id/ diakses pada tanggal 4 Juni 2022

dimiliki dalam jangka panjang dan jangka pendek. Rasio solvabilitas BPKH dari tahun ke tahun terus membaik.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai tingkat likuiditas, dan solvabilitas maka dapat dilihat pengaruh terhadap laporan keuangan dan kinerja keuangan yang telah disajikan di dalam laporan keuangan BPKH yang telah tersedia, yaitu laporan neraca, dan laporan laba rugi yang dapat menjadi tolak ukur dan dapat digunakan dalam menganalisis laporan keuangan, yaitu dengan rasio yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya.

- a. Ditinjau dari rasio likuiditas secara keseluruhan keadaan perusahaan berada dalam keadaan yang baik. Hal ini dapat kita lihat pada rasio lancar, rasio cepat dan rasio kas bahwa pada dasarnya mengalami kenaikan. Semakin tinggi atau besarnya nilai rasio likuiditas ini menandakan bahwa keadaan perusahaan berada dalam kondisi baik atau liquid. Liquid yaitu keadaan dimana perusahaan dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik karena mampu melunasi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas wajib, kemampuan BPKH menyediakan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), seperti terlihat dalam laporan keuangan BPKH, tampak lebih dari 2X seperti yang diamanatkan UU Nomor 34 Tahun 2014 – di mana BPKH wajib menjaga 2X BPKH. Jadi, tidaklah benar, BPKH tidak likuid. Justru BPKH sangat likuid.
- b. Berdasarkan rasio solvabilitas yang diukur dengan menggunakan *debt to assets ratio* dan *debt to equity ratio*, maka dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pada BPKH sangat baik. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan BPKH atas pelunasan utang, dan seluruh kewajiban dengan menggunakan jaminan dan aset neto (harta kekayaan dalam bentuk apa pun) yang dimiliki dalam jangka panjang dan jangka pendek. Rasio solvabilitas BPKH dari tahun ke tahun terus membaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Darminto,Dwi Prastowo. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*,UPP STIM YKPN:Yogyakarta
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta: Bandung
- Halim, Abdul. 2008. *Auditing*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Harahap, Sofyan Syafri. 2013. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hery. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Bumi Aksara: Jakarta
- <https://www.republika.co.id/berita/qvghw7423/akuntabilitas-pengelolaan-dana-haji-bpkh-raih-opini-wtp> diakses pada tanggal 2 Juni 2022.
- Kasmir.2008. *Analisis Laporan Keuangan. Edisi 7*, Raja Grafindo Persada: Jakarta

Kuncoro, Mudrajad. 2008. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta

Parathon, Audri Ayuwardani. 2012. Analisis Rasio Keuangan Perbankan Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan Bank. Jurnal. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol 3, No 2

Soeratno. 2008. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Andi: Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelola keuangan Haji.
<https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-34-Tahun-2014.pdf> diakses pada tanggal 2 Juni 2022.

www.bpkh.go.id/ diakses pada tanggal 4 Juni 2022